

**KEGAGALAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN
2009**

*By : Mafatihul Ulum
mafatihul18@gmail.com*

*Supervisor: Dr. Muchid, S. Sos, M. Phil
Library of Riau University*

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Lingga Regency is one of the young regencies in Kepulauan Riau province. After divided into autonomous regions since 2003, the regency has implemented three times Election, which in the 2004, 2009, and 2014. In the 2009, the final result comes with no women are elected as legislators in Lingga regency. It was noted that among of 20 members of the legislature who are not elected members of the legislature with the female gender. The presence of womenn in the legislature considered to be important because it can provide ideas and views that correspond to the presence of women themselves. The absence of women as legislators in Lingga regency is a form of failure of representation for women.

This study look at the process (mechanism)of recruitment by political parties in Lingga regency recruit women candidates and to determine the cause of the failure of women's representation in parliament of Lingga regency. The foundation for this research is theory of political recruitment. This study using a qualitative research approach. Based on the analysis, it can be seen that the political recruitment is the estuary of the quality of the proposed candidates. Political recruitment by political parties in the Lingga regency for the candidates is closed recruitment. Closed recruitment has some disadvantage with not involving public to see and assess the ability of elite that displayed.

The problem that faced by women in legislative elections in the Lingga regency are low education quality of voters, island regions, and economic factors. Accordance with these results, the failure of women's representation in the Lingga House of Representatives in 2009 due to the closed recruitment by political parties and low quality voters.

Keyword : Political Parties, Political Recruitment, Women

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan dalam Negara demokrasi dimana seluruh warga Negara ikut berpartisipasi dalam aktivitas pemerintahan. Dengan diadakannya pemilu legislatif, warga Negara dapat secara langsung memilih dan menentukan wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Indonesia adalah Negara demokratis yang memperhatikan dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya termasuk hak untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Akan tetapi ada perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan politik. Peran partai politiklah dalam menentukan dan merekrut kader perempuan terbaik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan telah mendapatkan sebuah *affirmative action* atau tindakan khusus sementara sebesar 30%.

Pada tahun 2009 tidak lagi terdapat wakil perempuan dalam susunan anggota legislatif DPRD kabupaten Lingga. Penurunan kuantitas wakil perempuan ini merupakan gambaran politik kabupaten Lingga yang tidak melibatkan perempuan sebagai legislator pemerintahan.

Tabel 1.1 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Lingga Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2004, 2009, dan 2014

NO.	PARTAI	TAHUN					
		2004		2009		2014	
		L	P	L	P	L	P
1	PDIP	2	-	2	-	1	-
2	GOLKAR	5	-	3	-	3	1
3	PATRIOT	2	-	-	-	-	-
4	PAN	2	-	2	-	-	-

5	PKS	3	-	2	-	2	-
6	PPIB	2	-	2	-	-	-
7	DEMOKRAT	1	-	2	-	3	-
8	PPP	1	-	2	-	1	-
9	PKB	1	-	2	-	1	-
10	PNBK	-	1	-	-	-	-
11	PKNU	-	-	1	-	-	-
12	PMB	-	-	1	-	-	-
13	HANURA	-	-	1	-	3	-
14	NASDEM	-	-	-	-	5	-
	JUMLAH	19	1	20	0	19	1

Sumber: KPUD Kabupaten Lingga Tahun 2014

Daerah pemilihan Lingga 1 meliputi kecamatan Lingga, kecamatan Lingga Utara, dan kecamatan Senayang dan daerah pemilihan Lingga 2 meliputi kecamatan Singkep dan kecamatan Singkep Barat. Fenomena yang terlihat adalah hanya satu orang calon anggota legislatif perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1 (satu). Penempatan caleg pada nomor urut 1 (satu) sangat diuntungkan dengan posisi dimana apabila jumlah suara untuk partai sangat besar maka caleg pada nomor urut 1 (satu) mendapatkan peluang untuk memenangkan kursi partai. Selain itu, nomor urut 1 (satu) juga mencerminkan caleg berada pada posisi strategis karena dianggap mendapat kepercayaan tinggi dari partai.

Selain fenomena penomoran caleg ada beberapa partai politik yang memiliki jumlah keterwakilan caleg perempuan yang cukup banyak, seperti yang memiliki keterwakilan perempuan seperti di bawah ini:

Tabel 1.4 Data Partai Politik dengan Jumlah Caleg Perempuan Terbanyak di Kabupaten Lingga tahun 2009

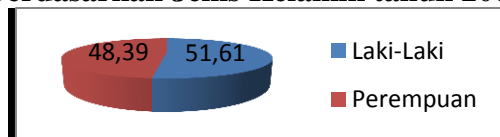
Partai	Dapil Lingga 1	Dapil Lingga 2	Total Caleg
PKS	4	4	24
PAN	3	4	19
PKB	3	4	22

GOLKAR	3	3	20
PDIP	4	3	20
DEMOKRAT	5	3	21
PKNU	2	3	7

Sumber KPU Kabupaten Lingga

Fenomena yang terjadi selanjutnya adalah dari total 26 partai politik yang mengikuti pemilu DPRD Kabupaten Lingga terdapat 81 orang caleg perempuan pada dapil Lingga 1 dan Lingga 2 akan tetapi tidak seorangpun caleg tersebut yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Lingga dan juga jumlah penduduk.

Gambar 1. Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Lingga Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2009



Sumber: Bappeda Kabupaten Lingga Tahun 2010

Melihat pentingnya peran serta DPRD Kabupaten dalam pembangunan daerah tentu saja tidak ideal apabila tidak melibatkan perempuan di dalamnya. Perempuan juga merupakan bagian dari daerah dan sudah sepatutnya juga ikut serta dalam pembangunan daerah.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana rekrutmen politik terhadap calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten Lingga tahun 2009?
2. Mengapa terjadi kegagalan keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Lingga tahun 2009?

3. PEMBAHASAN

Perempuan sebagaimana laki-laki juga harus aktif di dalam kegiatan partai politik untuk menunjang karir politik dan menambah kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Peran partai politiklah dalam menentukan dan merekrut kader perempuan terbaik untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Keterwakilan perempuan di DPRD sangat ditentukan oleh proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

3.1 Rekrutmen Politik Calon Legislatif di Kabupaten Lingga

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.

Rekrutmen politik merupakan muara dari kualitas nama-nama yang diajukan oleh partai politik kepada KPU karena dari proses rekrutmenlah partai menjaring kader terbaik dengan nilai jual yang tinggi agar nantinya ditargetkan dapat mendulang banyak suara bagi partai.

Perempuan secara biologis maupun pengalaman sangatlah berbeda dengan laki-laki sehingga memang harus memiliki wakil yang di tempatkan di keanggotaan lembaga penting seperti DPRD. Kekosongan perempuan di DPRD Kabupaten Lingga pada periode 2009-2014 telah mengakibatkan kekosongan kebijakan tentang perempuan dan anak yang biasanya menjadi fokus perempuan di parlemen pada umumnya.

Perempuan di legislatif juga sangat penting adanya agar dapat menginspirasi perempuan lain di luar legislatif agar dapat mengangkat diri dari cap lemah dan tidak berdaya. Perempuan di legislatif juga dapat menjadi contoh betapa besarnya perempuan dapat mempengaruhi sebuah kebijakan bahkan membuat kebijakan sendiri demi kepentingan masyarakat.

Di kabupaten Lingga keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lingga seharusnya tidak sampai terjadi kekosongan seperti pada tahun 2009 jika melihat jumlah perempuan di kabupaten Lingga yang berjumlah sekitar 48% dari total penduduk di Lingga. Cukup mengecewakan ketika *affirmative action* tidak dapat berbuat banyak terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lingga yang bukan saja tidak menempatkan setidaknya 30% di legislatif akan tetapi sama sekali tidak mendapatkan keterwakilan perempuan pada satu periode yakni 2009-2014.

Pentingnya perempuan di lembaga legislatif seperti DPRD juga akibat memandang perbedaan kepentingan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki dianggap tidak dapat mewakili perempuan sebagaimana perempuan mengerti dengan kepentingan dan kebutuhannya sendiri.

Politik adalah arena kompetisi kepentingan dimana politik adalah tempat segala kepentingan-kepentingan yang ada diperjuangkan, maka dari itu penting adanya bahwa politik juga dapat menempatkan kepentingan-kepentingan perempuan di dalamnya. Pentingnya perempuan di lembaga legislatif juga demi menghindari diskriminasi dan mencegah perempuan berada di posisi tidak menguntungkan terhadap perempuan itu sendiri.

Sesuai dengan aturan yang ada dalam pemilihan umum di Indonesia, perempuan harus menempatkan wakilnya dengan jumlah sebanyak-banyaknya agar dapat memperjuangkan nasib mereka sendiri sebagai pengambil kebijakan atau dalam hal ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.

3.1.1 Rekrutmen Partai Politik di Kabupaten Lingga

Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik

menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat. Selayaknya rekrutmen politik terbagi atas dua macam menurut Czudnomski juga mengemukakan mekanisme rekrutmen politik antara lain:

- a. Rekrutmen terbuka, di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:
 - i. Mekanismenya demokratis
 - ii. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
 - iii. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
 - iv. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.
- b. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri.

Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Di kabupaten Lingga pengusungan terhadap kandidat calon anggota legislatif umumnya dilakukan secara internal partai dengan menargetkan calon-calon yang bersumber dari kader partai maupun tokoh masyarakat. Calon-calon yang sudah ditargetkan kemudian diseleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh partai. Seperti yang diungkapkan oleh Khairul Anwar sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lingga yang mengatakan bahwa:

“Kita (Partai Demokrat) membentuk PAC (Pengurus Anak Cabang) dan mensosialisasikan program-program dengan target pemuda dan tokoh masyarakat. Selanjutnya bagi yang ingin mencalonkan diri diseleksi nama-namanya oleh tim seleksi DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dengan memperhatikan setidak-tidaknya telah bergabung dalam partai selama 6 bulan”.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera juga hampir sama dengan partai politik lainnya. Menurut Kasmadi (Sekretaris DPC PKS kabupaten Lingga) mengatakan:

“Seleksi nama-nama caleg itu oleh internal partai dengan menyesuaikan dengan AD/ART partai. Targetnya adalah kader dan simpatisan yang merupakan tokoh masyarakat yang sekiranya memiliki dukungan masyarakat”.

Berdasarkan teori di atas tersebut dan menilik lebih dalam tentang proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai

politik di kabupaten Lingga secara garis besar menggunakan rekrutmen tertutup. Partai politik di kabupaten Lingga melakukan rekrutmen dengan cara yang secara umum sama yaitu dengan sosialisasi dan mengajak bergabung pemuda dan tokoh masyarakat sebagai kader yang bisa dianggap menjadi tabungan suara partai.

3.1.2 Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan

Penetapan kuota 30% tidaklah mutlak membuka jalan bagi perempuan untuk ikut serta dalam politik. Pada akhirnya keputusan mengenai siapa-siapa saja yang akan diajukan partai politik sebagai calon legislatif kembali berpulang kepada kebijakan partai politik masing-masing dan bahkan bisa lebih sempit kepada kebijakan elit politik partai.

Czudnowski (dalam Putra, 259) mengemukakan definisi rekrutmen politik yaitu: *“The process through which individuals or group of individuals are inducted into active political roles”.*

Dengan proses rekrutmen partai politik seperti pemaparan sebelumnya, Khairul Anwar juga mengatakan bahwa

“Sulit bagi kami untuk mendapatkan calon legislatif perempuan yang berkualitas di Lingga. Partai harus bekerja keras agar kuota 30% terpenuhi”

Alasan lainnya adalah masyarakat tidak diajak secara terbuka untuk menentukan calon wakilnya di DPRD dan hanya diberikan nama-nama yang secara tertutup diseleksi oleh partai politik dimana ketidakterbukaan partai ini menutup partisipasi dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Dalam perspektif gender, penyusunan daftar bakal calon legislatif yang diajukan ke KPU merupakan refleksi dari jabatan kader tersebut yang sebagian besar menempatkan caleg perempuan di

nomor urut 3 (tiga) dimana diberikan kepada bendahara partai yang biasanya diisi oleh perempuan. Akan tetapi proses rekrutmen politik terhadap perempuan yang disertakan dalam calon legislatif tahun 2009 dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak efektif pada saat menjelang pemilihan umum akan dilangsungkan. Ibu Yulidar dari PPP menuturkan:

“Partai biasanya merekrut caleg perempuan menjelang pemilu untuk menutup kuota 30%, ini tidak hanya berlaku di PPP tetapi juga Golkar dan partai lain di kabupaten Lingga”.

Tabel 3.2 Penempatan Nomor Urut Calon Legislatif Perempuan

Urutan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
Jumlah	1	10	31	3	2	14	3	4	6	1	3	3	81

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah terbesar caleg perempuan berada di nomor urut 3 dan 6. Penempatan perempuan pada nomor urut 3 dan 6 merupakan refleksi dari peraturan yang dimuat di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 55 ayat (2).

Intinya adalah partai benar-benar mau atau tidak mau harus menempatkan caleg perempuan dalam setiap 3 orang caleg. Ruang konstitusional itu biasanya hanya dapat diisi oleh pengurus perempuan yang biasanya pada nomor urut 3, sedangkan calon-calon lain yang direkrut menjelang pemilu hanya mendapatkan tempat pengembira saja agar kuota 30% perempuan dalam daftar calon terpenuhi. Pendapat Ibu Yulidar tersebut juga dikuatkan oleh Qatrun Nadda dari PKS yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak dilatih sebagai kader partai perempuan yang dapat bersaing, partai (PKS) mengajak

saya untuk masuk ke dalam daftar caleg dan ditempatkan pada nomor urut 9”

Calon legislatif dari PKS ini direkrut menjelang proses pemilihan legislatif karena diminta langsung oleh partai. Akan tetapi beliau tidak diberikan pendidikan politik menjelang proses pemilihan sementara nomor urut yang ia dapatkan juga berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kurangnya pendidikan politik terhadap kader tentunya menjadi point pembelajaran yang harus dibenahi oleh setiap partai politik yang ada di kabupaten Lingga agar kadernya mampu bersaing pada proses pemilihan di daerah walaupun kader yang direkrut tidak menjalani rangkaian kegiatan rutin yang diselenggarakan partai.

3.2 Penyebab Kegagalan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Lingga Tahun 2009

Tidak terpilihnya perempuan disebabkan oleh kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam upaya untuk memenangkan pemilu tersebut.

3.2.1 Proses Pemilihan Legislatif di Kabupaten Lingga Tahun 2009

Penetapan jumlah 20 orang anggota DPRD Kabupaten Lingga berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan angka yang mencatat bahwa jumlah penduduk di kabupaten Lingga adalah sebanyak 93.783 jiwa yang terbagi atas 48.401 jiwa penduduk laki-laki dan 45.382 jiwa penduduk perempuan.

Pelaksanaan pemilu tahun 2009 tersebut mencatat hampir 80% pemilih yang terdaftar telah memberikan suaranya dan partisipasi pemilih pada pemilihan umum legislatif 2009 ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Pemilih yang Terdaftar dan Pemilih yang Memberikan Suara Menurut Kecamatan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009

Kecamatan	Pemilih yang Terdaftar	Pemilih yang Memberikan Suara			
		DPR RI	DPRD I	DPRD II	
		01.	Singkep Barat	10.388	8.141
02.	Singkep	20.157	14.398	14.358	14.358
03.	Lingga	11.293	9.434	9.394	9.394
04.	Lingga Utara	7.570	6.109	6.069	6.069
05.	Senayang	12.748	11.158	11.118	11.118
Kabupaten Lingga		62.156	49.240	49.240	49.240

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lingga

Kenyataan bahwa tidak adanya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif daerah tentu saja tidak bisa dianggap sebagai angin lalu. Ibu Megawati (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga) mengatakan:

“Memang perempuan di dalam DPRD itu penting, tetapi semua dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemilih.”

3.2.2 Kendala Perempuan Dalam Keterlibatan di Politik

Kendala ini di utarakan oleh sejumlah caleg perempuan yang ikut bersaing pada tahun 2009 antara lain Qatrun Nadda (PKS) yang menyatakan bahwa penyebab tidak berhasil ia menduduki kursi legislatif ialah :

1. Modal ekonomi.
2. Kampanye tidak memadai.
3. Tidak dilatih sebagai kader partai.
4. Kualitas pemilih masih rendah.

Sy. Teja Pradakshina (Golkar) juga mengutarakan beberapa penyebab tidak berhasil ia menjadi anggota legislatif antara lain:

1. Kurang sosialisasi.

2. Daerah kepulauan menyebabkan sulit untuk dijangkau kampanye.
3. Serangan fajar/politik uang.
4. Kualitas pemilih kurang baik dan masih termakan politik uang.
5. Kader partai aktif perempuan hanya di nomor urut 3, sisanya hanya untuk mencukupkan kuota
6. Merasa budaya berpengaruh, perempuan kurang dipercaya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka teridentifikasi beberapa kendala antara lain:

1. Rendahnya Kualitas Pendidikan Pemilih
2. Faktor daerah Kepulauan dan Ekonomi

Berikut penjelasan kendala terpilihnya perempuan dalam proses pemilihan calon legislatif di kabupaten Lingga.

1. Rendahnya Kualitas Pendidikan Pemilih

Faktor pendidikan pemilih juga menjadi halangan bagi perempuan yang ingin menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Lingga. Pemilih dengan kualitas pendidikan rendah biasanya hanya tertarik dengan faktor materi yang ditawarkan caleg..

Perempuan tidak bisa menutup mata terhadap politik uang yang masih terjadi di Indonesia khususnya di Lingga, dimana target-target politik uang adalah mereka yang memiliki hak suara dan memiliki kepedulian rendah terhadap politik. Syarifah Teja Pradhaksina calon legislatif dari Partai Golongan Karya mengatakan:

“Masyarakat banyak yang lebih memperhatikan calon yang

memberikan serangan fajar karena tidak paham terhadap politik. Walaupun kita sudah membantu sejak jauh-jauh hari tetap yang dipilih adalah yang memberikan serangan fajar”.

Kualitas pemilih yang rendah juga menjadi perhatian Ibu Yulidar dari Partai Persatuan Pembangunan, beliau mengatakan:

“Seharusnya masyarakat sadar bahwa suara mereka sangat berpengaruh. Jika saja perempuan mau memilih caleg perempuan tentu saja tidak akan sampai terjadi kegagalan keterwakilan perempuan di DPRD”.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, Megawati juga menyuarakan pemikiran serupa dan mengatakan:

“Memang sulit bagi caleg perempuan untuk bersaing karena masyarakat masih rendah pemikiran dan pendidikannya”

Masyarakat tidak bisa dikesampingkan dalam permasalahan ini karena masyarakatlah yang memegang kunci siapa-siapa saja yang akan duduk di kursi DPRD. Akan tetapi keberadaan masyarakat juga menjadi blunder ketika masyarakat yang seharusnya merepresentasikan diri mereka ke dalam lembaga legislatif justru tidak demikian adanya.

Tabel 3.4 Banyaknya Rumah Tangga Miskin menurut Kecamatan dan Ijazah Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangganya di Kabupaten Lingga, 2008

No.	Kecamatan	Tidak Punya	SD	SLTP	SMA Ke Atas
1	Singkep Barat	622	72	11	6
2	Singkep	821	257	51	36
3	Lingga	1.138	265	38	13
4	Lingga Utara	873	118	13	5

5	Senayang	2001	396	56	18
	Jumlah	5.455	1.108	169	78

Sumber: BPS Kabupaten Lingga Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008

Keberadaan kualitas rendahnya pendidikan masyarakat ini memberi celah bagi para pelaku politik uang untuk memanfaatkan sebesar-besarnya masyarakat yang cenderung tidak peduli atas politik. Tentu saja politik uang bukanlah sesuatu yang pantas dilakukan dalam demokrasi yang ideal, akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa politik uang masih lekat dengan dunia politik dan targetnya adalah masyarakat dengan pendidikan rendah yang cenderung pasif dan tidak terlalu mempedulikan politik.

2. Faktor Daerah Kepulauan dan Ekonomi

Kondisi geografis kabupaten Lingga yang berbentuk kepulauan jugalah yang menjadi halangan dan rintangan yang harus dihadapi seluruh calon legislatif baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Qatrun Nadda Caleg dari PKS:

“Sulit mengharapkan pemilih di daerah kota karena cenderung sudah memiliki pilihan, sulit juga untuk menjangkau pemilih yang berlokasi di pulau-pulau karena transportasi kurang memadai”

Tabel 3.5 Banyaknya Pulau dan Luas Wilayah menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Sudah Dihuni	Belum Dihuni	Jumlah
1	Singkep Barat	15	37	52
2	Singkep	4	31	35
3	Lingga	9	62	71
4	Lingga Utara	12	-	12
5	Senayang	55	306	361
	Jumlah	95	436	531

Sumber: Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Kabupaten Lingga

Secara ekonomi, perempuan terkendala dengan dana kampanye yang besar untuk berkampanye ke daerah pulau yang jauh dari lokasi caleg-caleg tersebut. Masalah dana merupakan masalah yang sering ditemui oleh kalangan perempuan dalam politik. Masalah dana jugalah yang membedakan sukses atau tidaknya politik dan cenderung terlihat bahwa partai dengan dana kampanye yang besar akan lebih mudah menjangkau masyarakat.

4. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di kabupaten Lingga secara garis besar menggunakan rekrutmen tertutup. Partai politik di kabupaten Lingga melakukan rekrutmen dengan cara yang secara umum sama yaitu dengan sosialisasi dan mengajak bergabung pemuda dan tokoh masyarakat sebagai kader yang bisa dianggap menjadi tabungan suara partai. Akan tetapi perekrutan cenderung terburu-buru dan tidak melalui proses pengkaderan yang ideal dimana perekrutan dilakukan menjelang pemilihan umum akan dilaksanakan menjadi bumerang sendiri bagi partai politik di kabupaten Lingga karena tidak satupun calon anggota legislatif perempuan yang berhasil mendapati kursi di DPRD kabupaten Lingga pada proses pemilihan umum tahun 2009.
2. Rekrutmen partai yang tertutup merupakan awal dari

kegagalan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lingga pada tahun 2009. Rekrutmen tertutup mengakibatkan masyarakat tidak bisa ikut serta dalam proses rekrutmen partai yang ideal. Partai memilih calon-calon yang dianggap memiliki suara dari luar partai, akan tetapi itu saja tidak cukup karena caleg yang demikian memiliki kelemahan dalam pengalaman secara politik karena tidak dilibatkan dalam kepemimpinan partai sebelumnya. Faktor lainnya adalah ekonomi dan bentuk daerah kepulauan dimana merupakan faktor mendasar karena tidak lepas dari latar belakang daerah Lingga yang merupakan penghambat dalam kampanye dan menyulitkan perempuan sebagai seorang istri. Ekonomi menjadi berpengaruh ketika dibutuhkan dana besar untuk menjangkau pemilih di daerah kepulauan dengan akses yang cukup tertutup. Faktor terakhir adalah rendahnya kualitas pendidikan pemilih yang menyebabkan rentan terhadap politik uang. Politik uang sudah menjadi rahasia umum yang terus berkembang di kancah politik di Indonesia. Walaupun diancam dengan sanksi-sanksi terhadap pelakunya akan tetapi kualitas pendidikan pemilih yang rendah mengakibatkan munculnya celah bagi praktek-praktek politik uang tetap menjamur khususnya di kabupaten Lingga.

1.2 Saran

Adapun beberapa saran agar meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik di kabupaten Lingga dan mencegah kegagalan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga untuk masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menggunakan proses rekrutmen politik yang terbuka oleh partai politik agar masyarakat dapat mengenal jauh sebelum pemilihan umum dilaksanakan dan memberikan pendidikan politik kepada perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan di dalam politik.
2. Meningkatkan kualitas pemilihan dengan mensosialisasikan pentingnya keberadaan perempuan di lembaga legislatif untuk mewakili perempuan di daerah kepada masyarakat dan mempermudah ruang gerak calon legislatif perempuan untuk bisa bersosialisasi di daerah-daerah kepulauan dengan memperluas jaringan informasi dan transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kurniawan. 2011. *Dinamika Politik Lokal: Proses Penetapan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2009-2014*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Akbarizan. 2012. *Wanita, Politik dan Hukum Islam*. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN SUSKA Riau
- Alimin Siregar. 2007. *Membangun Citra Positif Kaum Perempuan Terhadap Politik*. Pekanbaru: Unri Press
- Andek Masnah Andek Kelawa. 1999. *Kepemimpinan Wanita dalam Islam Kedudukannya dalam Syariah*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
- Eko Sugiarto. 2013. *Master EYD Edisi Baru*. Yogyakarta: Suaka Media
- Fadillah Putra. 2004. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- GKR Hemas, DR (HC) Martha Tilaar. 2013. *Perempuan Parlemen dalam Cakrawala Politik Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Inu Kencana Syafie. 2003. *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*, Jakarta: Perca Ilmu
- Lina Suanda Sari. 2010. *Rekrutmen Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Rdan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2007*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Maulinda Sari. 2010. *Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Pekanbaru*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mochtar Mas'od, Colin MacAndrews. 2001. *Perbandingan sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjadara University Press

- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- P. Anthonius Sitepu. 2012. *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha
- Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik Teori Dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarisme
- Sofia hardani, dkk. 2012. *Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN SUSKA Riau
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Siyernis. 2013. *Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Widodo, 2004. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian: Skripsi Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Kelopak-Magna Script
- Yusmar Yusuf. 2009. *Studi Melayu*. Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra
- Sumber Lain:**
- <http://ayusartikayuliarti.wordpress.com/2009/07/02/perempuan-dan-politik/> (diakses tanggal 04 Maret 2014)
- <http://linggakab.site40.net/penduduk.php> (diakses tanggal 27 Januari 2014)
- <http://news.metrotvnews.com/read/2013/12/22/203058/partisipasi-perempuan-dalam-politik-tidak-diikuti-pengetahuan-memadai> (diakses tanggal 18 Februari 2014)
- <http://www.dnaberita.com/berita-103032-peran-perempuan-di-dunia-politik-punya-nilai-strategis.html> (diakses tanggal 18 Februari 2014)
- <https://www.jurnalperempuan.org/perempuan-dan-partai-politik-fenomena-kuota-tanpa-kader.html> (diakses tanggal 18 Februari 2014)
- <http://www.menegpp.go.id/v2/index.php/component/content/article/12-anak/570-membangun-wacana-publik-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-melalui-media-visit> (diakses tanggal 27 Maret 2014)
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/27/caleg-pkpi-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-harus-ditingkatkan> (diakses tanggal 27 Maret 2014)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah